

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**WEWENANG LURAH DALAM MENGKOORDINASI PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN SEDINGINAN KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**RIO KUSBELI
NPM : 137310278**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rio Kusbeli
NPM : 137310278
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi
Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Usulan Penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian Konferehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pekanbaru, 12 November 2020
Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP,M.Si



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si



Dr. Ahmad Fikri, S.IP., MA

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

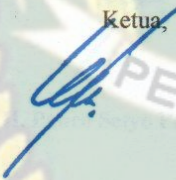
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

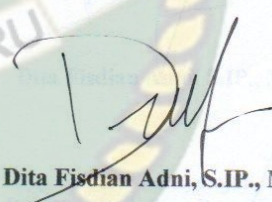
Nama : Rio Kusbeli
NPM : 137310278
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi
Pembangunan Di Kelurahan Sedingin
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Ketua,

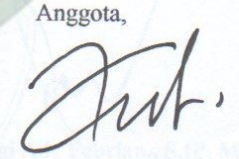
Pekanbaru, 12 November 2020
Sekretaris,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Anggota,

Mengetahui,
Wakil Dekan I,


Dr. Ahmad Fitra, S.IP., MA


Indra Satri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rio Kusbeli
NPM : 137310278
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi
Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Ketua,

Pekanbaru, 12 November 2020
Sekretaris,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1247/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 29 Juni 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2020 jam 15.00 – 16.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : RIO KUSBELI
NPM : 137310278
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Wewenang lurah dalam Mengkoordinasi Pembangunan di Kelurahan Sedinginan KEcamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Nilai Ujian : Angka : " 76,96 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Anggota	3. 

Pekanbaru, 04 Oktober 2020
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 197 /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : RIO KUSBELI
N P M : 137310278
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Wewenang lurah dalam Mengkoordinasi Pembangunan di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Struktur Tim :

1. Dr. H.Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Penyampaian Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian ini yang berjudul “Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Lathif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktu dan tenaganya serta memberikan izin kepada penulis dalam penelitian ini.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
8. Kepada Pegawai dan segenap jajaran pegawai di kantor Kelurahan Sedinginan dan juga masyarakat yang membantu kelancaran penulis dalam memberikan data guna melengkapi Skripsi ini.

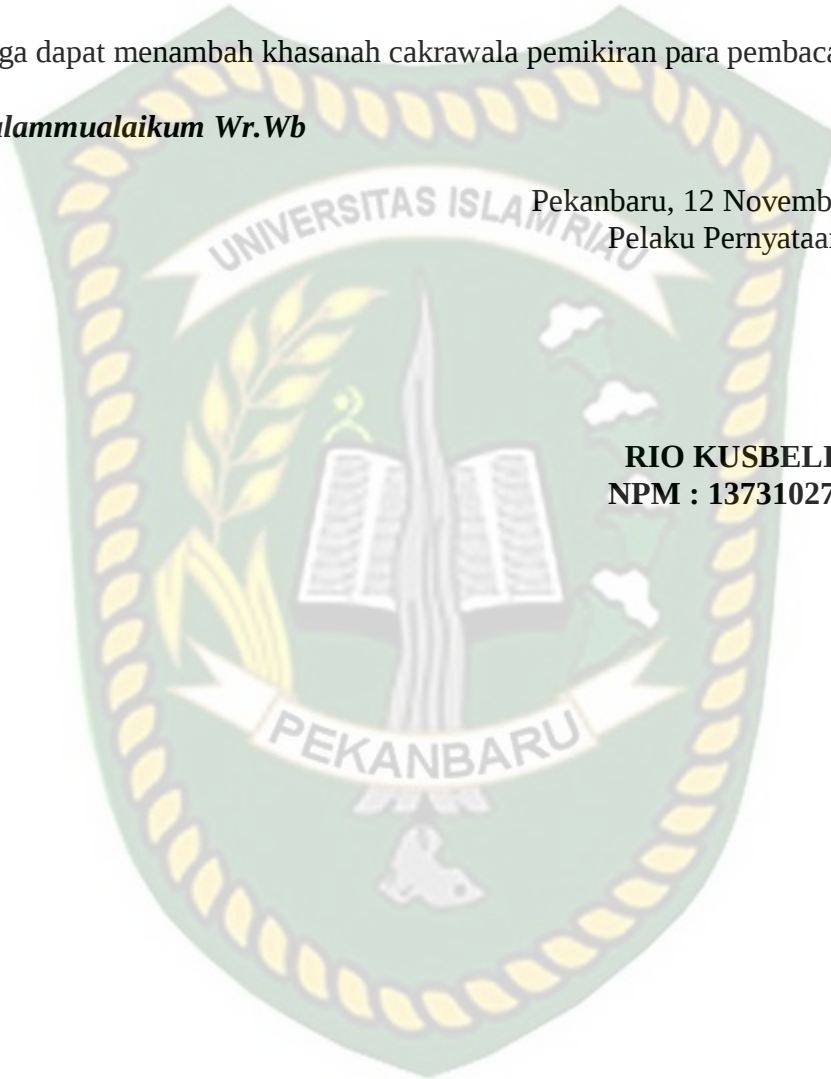
Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 12 November 2020
Pelaku Pernyataan,

RIO KUSBELI
NPM : 137310278



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1. Tujuan.....	13
2. Kegunaan.....	13
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Pemerintahan.....	15
2. Konsep Kebijakan Pemerintahan	18
3. Konsep Koordinasi.....	21
3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi.....	27
4. Konsep Kewenangan.....	31
4.1 Sumber Kewenangan	32
5. Konsep Pembangunan.....	34
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pikir	46
D. Konsep Operasional	47
E. Operasional Variabel.....	49
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Informan Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data	52

E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisa Data.....	55
G. Jadwal Kegiatan Peneliti	58
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir.....	59
1. Sejarah dan Keadaan Geografis Kab. Rokan Hilir.....	59
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	66
B. Gambaran Umum Kecamatan Tanah Putih.....	68
C. Struktur Organisasi.....	70
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	71
B. Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	72
1. Perencanaan (<i>Planning</i>)	73
2. Pengorganisasian.....	76
3. Pengarahan (<i>Directing</i>)	79
4. Pengendalian (<i>Controlling</i>).....	82
C. Faktor-Faktor Penghambat yang Dialami oleh Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	86
BAB VI :PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Data Pelaksanaan Program di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019	10
I.2	: Rincian Pendapatan Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2019	11
II.1	: Penelitian Terdahulu Terkait dengan penelitian yang berjudul Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	37
II.2	: Operasional Variabel Tentang Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	50
III.1	: Jumlah Key informan dalam penelitian tentang Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	52
III.2	: Jadwal Waktu Penelitian Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	58
IV.1	: Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018	62
IV.2	: Kecamatan, Ibukota Dan Luas Wilayah Yang Berada Di Kabupaten Rokan Hilir	67
V.1	: Identitas Resonden Penelitian Terkait Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kontribusi Manajemen Terhadap Keefektifan dalam Koordinasi	23
II.2 : Kerangka Pikran Penelitian Tentang Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	47
III.1 : Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	55
IV.1 : Struktur Organisasi Kelurahan Sedinginan	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Wawancara Dengan Sekretaris Kelurahan Terkait Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	93
2 : Daftar Wawancara Dengan Kaur Pembangunan Kelurahan Sedinginan Terkait Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	96
3 : Daftar Wawancara Dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terkait Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	99
4 : Daftar Wawancara Dengan Anggota Badan Pemberdayaan Kelurahan Sedinginan Terkait Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	102
5 : Daftar Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Sedinginan Terkait Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	105
6 : Dokumentasi Foto Penelitian Terkait Dengan Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	108
7 : Dokumentasi Surat Penelitian Terkait Dengan Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	109

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rio Kusbeli
NPM : 137310278
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 November 2020
Pelaku Pernyataan,

Rio Kusbeli
NPM : 137310278

**WEWENANG LURAH DALAM MENGKOORDINASI PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN SEDINGINAN KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

ABSTRAK

Oleh
Rio Kusbeli

Kata Kunci : Wewenang, Mengkoordinasi, Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Indikator dari penelitian ini adalah Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengendalian. Tipe penelitian yang berlokasi di Kelurahan Sedinginan ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Lurah Sedinginan, Sekretaris Kelurahan, Kaur Pembangunan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Anggota Badan Permusyawaratan Kelurahan, Tokoh Masyarakat Sedinginan. Adapun Teknik Sensus untuk informan pegawai Lurah Sedinginan, Ketua LPM, dan Anggota BPK , jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan teori creswell. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa koordinasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Lurah Sedinginan belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini diperkuat dari hasil observasi di lapangan bahwa masih banyak pembangunan belum selesai sesuai dengan target pengerjaan yang sudah direncanakan, serta pembangunan yang sudah direncanakan belum secara keseluruhan terlaksana.

**LURAH'S AUTHORITY TO COORDINATE DEVELOPMENT IN SEDINAN
KELURAHAN KECAMATAN TANAH PUTIH DISTRICT ROKAN HILIR**

ABSTRACT

By

Rio Kusbeli

Keywords: Authority, Coordinating, Development

This study aims to analyze how the Head of the Village Coordinates Development in Sedingin Village, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency. The indicators of this research are planning, organizing, directing, controlling. This type of research, which is located in Sedingin Village, is a descriptive survey, which prioritizes interviews as a means of collecting data and the data collected by this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of the research objectives in the location under study. The informants in this study were the Head of the Sedingin Village, the Secretary of the Kelurahan, the Head of Development, the Chairperson of the Community Empowerment Institution, Members of the Village Consultative Body, Community Leaders of Sedingin. As for the Census Techniques for Lurah Sedingin employee informants, the Head of LPM, and members of the BPK, the types and data collection techniques used in this study consisted of primary data being collected using interviews and secondary data collected using observation and documentation techniques. Meanwhile, the data analysis technique used is the Creswell theory. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that the development coordination carried out by the Sedingin Village Head has not been carried out optimally, this is reinforced from the results of observations in the field that there are still many developments that have not been completed in accordance with the work targets that have been planned, and the development that has been planned has not been implemented yet. the whole thing happened.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani.

Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara RI. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Danuri, 2004)

Kegiatan-kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Hal ini sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi : “
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” yakni bahwa Negara Indonesia sangat luas dan selaras dengan Pembangunan Nasional yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, mengadakan musyawarah, menciptakan suasana menunjang, serta masyarakat dituntut partisipasinya mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan tersebut.

Pembangunan merupakan salah satu usaha untuk menaikkan taraf hidup rakyat Bangsa dan Negara atau dapat meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat. Pembangunan Prasarana-prasarana tersebut merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membantu masyarakat Kelurahan dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh.

Menurut Afifuddin (2012:47) pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari Negara-negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh absolut” yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti :

- a. Keadilan sosial;
- b. Kemakmuran yang merata;
- c. Perlakuan sama dimata hukum;
- d. Kesejahteraan material, mental dan spiritual;

- e. Kebahagiaan untuk semua;
- f. Ketentraman; dan
- g. Keamanan

Dengan melihat tujuan-tujuan diatas, nyatalah bahwa sesungguhnya tidak ada titik akhir dalam Pembangunan. Pembangunan Nasional juga merupakan suatu proses perubahan yang memerlukan partisipasi masyarakat, sehingga untuk menggerakkan dan menggugah partisipasi tersebut diperlukan komunikasi yang baik. dengan komunikasi yang baik diharapkan adanya interaksi dalam masyarakat, dan interaksi tersebut orang dapat berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi, dan saling bertukar pikiran dalam bentuk komunikasi berupa koordinasi antara Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar bermanfaat sehingga ide-ide pembangunan yang dilaksanakan mendapat dukungan oleh masyarakat sehingga bersedia menerima suatu perubahan. Dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pembangunan terbagi atas dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata sedangkan pembangunan nonfisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama seperti berupa peningkatan perekonomian rakyat Desa, peningkatan kesehatan masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas bahwa Koordinasi antara Pemerintahan dan Lembaga lainnya pada hakikatnya merupakan upaya memudahkan atau mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai

kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan serta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan, koordinasi perlu dilaksanakan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya

Pembangunan daerah pasti akan melibatkan berbagai unsure / pihak/ komponen, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. tingkat keterlibatan berbagai komponen tersebut akan terbagi ke dalam berbagai varian fungsi dan peranan, varian fungsi dan peranan tersebut menyebabkan perbedaan kepentingan yang beragam pula, karena perbedaan itulah, diperlukan adanya koordinasi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan harmonis antara komponenkomponen yang berbeda tersebut.

Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan

Menurut Siagian, Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula, koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. kesimpulan dari pengertian koordinasi yaitu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

Koordinasi salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan atau unit kerja yang ada di suatu daerah guna mempermudah proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksana pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai.

Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percekcoan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang harmonis.

Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak.

Di dalam tatanan Pemerintahan di Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan tanggung jawab kepada Bupati/Walikota, dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Salah satu dari aspek kewenangan dari Camat adalah melakukan koordinasi, koordinasi ini bisa dilakukan baik dalam lingkungan internal Kecamatan maupun koordinasi pada tingkat Desa atau Kelurahan. Dan koordinasi yang dilakukan seperti estafet, setelah pihak Kecamatan memberikan koordinasi kepada tingkat kelurahan dan Desa maka, pihak kelurahan dan Desa memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk melakukan koordinasi kepada bawahan lingkungan instansinya tetapi wajib dalam koridor yang ditetapkan oleh pihak Kecamatan berupa Peraturan.

Pembangunan Nasional juga merupakan suatu proses perubahan yang memerlukan partisipasi masyarakat. Sehingga untuk menggerakkan dan menggugah partisipasi tersebut diperlukan komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik diharapkan adanya interaksi dalam masyarakat, dan interaksi tersebut orang dapat berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi, dan saling bertukar pikiran dalam bentuk komunikasi berupa koordinasi antara

Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar bermanfaat sehingga ide-ide Pembangunan yang dilaksanakan mendapat dukungan oleh masyarakat sehingga bersedia menerima suatu perubahan. Dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas bahwa Koordinasi antara Pemerintahan dan Lembaga pada hakikatnya merupakan upaya memudahkan atau mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan serta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Koordinasi perlu dilaksanakan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya.

Frekuensi pelaksanaan koordinasi yang bersifat vertikal menunjuk pada seberapa besar kegiatan koordinasi yang bersifat vertikal dilaksanakan. Hal ini penting karena Lurah selaku pimpinan di lingkungan pemerintah Kelurahan harus dapat menjamin serta membentuk keserasian dan keterpaduan terhadap para aparat pemerintahan bawahannya dalam suatu tujuan dan bekerjanya aparatur pemerintahan, maka diperlukan adanya pengaturan-pengaturan yang dapat berwujud satu peraturan tata tertib dan kerja sama secara keseluruhan didalam pelaksanaan koordinasi yang bersifat vertikal. Dengan adanya koordinasi yang bersifat vertikal ini Lurah sebagai seorang pimpinan berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kelurahan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan administrasi Pemerintahan Kelurahan. Dengan demikian Lurah sangat perlu untuk mengadakan pengkoordinasian dengan bawahannya.

Pelaksanaan frekuensi Koordinasi yang bersifat horisontal ini merupakan suatu bentuk mengkoordinasikan kegiatan, tindakan, penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Upaya pelaksanaan Koordinasi bersifat Horisontal ini dilaksanakan oleh Lurah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi horizontal dan antara instansi horisontal dengan dinas-dinas terkait daerah agar tercapai hasil sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh sebab itu, maka Lurah wajib melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dengan selalu berkoordinasi dengan pejabat atau aparat yang setingkat demi tercapainya suatu peningkatan disegala bidang yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana salah satu faktor penting dalam keberhasilan Lurah ialah meningkatkan frekuensi Koordinasi yang bersifat horisontal.

Berkaitan dengan pembahasan diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti dalam pembahasan penelitian ini adalah tentang koordinasi yang dilakukan oleh seorang lurah terhadap komponen lembaga di sekitarnya untuk melaksanakan pembangunan ditingkat Kelurahan, khususnya Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Pembangunan yang dilaksanakan ditingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional, untuk menunjang pembangunan di tingkat Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan agar komunikasi dan keselarasan pemikiran dapat di capai yang berdampak akan semakin mudahnya proses pembangunan dilakukan.

Untuk mengetahui wewenang dari seorang lurah tentunya harus di dasari pada Tugas Dan Fungsi yang mereka emban dalam bertugas, dan dengan demikian, maka penulis akan menyajikan tugas dan fungsi dari Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir, dan adapun tugas dan fungsi kelurahan berdasarkan aturan-aturan tersebut dapat dilihat pada penyajian dibawah ini:

1. Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentramaan dan ketertiban;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 - g. Penyusunan program kegiatan kelurahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- h. Penjabaran perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- i. Pemberian pengarahan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan petunjuk/bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat;
- k. Pelaksanaan sebagian tugas bupati di kelurahan dalam bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
- l. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk legalisasi surat yang diperlukan warga dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Pembantuan meningkatkan perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
- n. Penyusunan usulan-usulan dan masukan untuk diusulkan ke pemerintahan kecamatan dan sebagai bahan penyusunan program pembangunan di kelurahan;
- o. Pengadaan pembinaan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian

warga sehingga tercipta kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan sejahtera;

- p. Pemberiaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan pelayanan di bidang pertanahan;
- q. Penetapan keputusan, instruksi, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan bersama aparat terkait;
- r. Penginventarisasian dan memecahkan permasalahan yang muncul baik masalah pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan agar terwujud rasa aman dan tenteram bagi masyarakat;
- s. Peningkatan perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dengan cara mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun untuk bahan langkah-langkah tindak lanjut atau bahan laporan kepada atasan;
- u. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- v. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- w. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- x. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Berdasarkan tugas dan fungsi kelurahan yang telah disajikan diatas, yang menjadi dasar penelitian penulis adalah pembahasan yang terdapat pada point (J), dimana dikatakan bahwa salah satu fungsi dari kelurahan adalah untuk melaksanakan “*Koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat*” dengan dasar tugas dan fungsi tersebutlah penulis akan melakukan analisis penelitian untuk mencari tau bagaimana proses koordinasi yang dilakukan oleh Lurah Sedinginan dalam mengkoordinasi segala komponen lembaga dan masyarakat di Kelurahan Sedinginan seperti LPM, lembaga adat, BPD, dan juga tokoh masyarakat sekitar.

Pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih pada tahun 2019 telah berjalan dalam beberapa tahap, dan beberapa program pembangunan yang di jalankan oleh Pemerintah Kelurahan adalah berikut ini:

Tabel 1.1 Data Pelaksanaan Program di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.

No	Program	Jumlah	Target Selesai	Keterangan
1	Pembangunan Sumur Bor.	11 Unit	2019	Belum Selesai
2	Pembangunan Posyandu Mantri Umum.	1 Unit	2019	Selesai
3	Semenisasi Jalan Kampung	7 Titik	2019	Belum Selesai

4	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kelurahan	7 Titik	2019	Belum Selesai
5	Pembangunan Lapangan Olah Raga (Volly Ball).	1 Titik	2019	Selesai
6	Pembangunan Pemakanan Umum	1 Lokasi	2019	Selesai
7	Pembangunan MCK	3 Titik	2019	Belum Selesai
8	Pemberdayaan Masyarakat	-	2019	Belum Terlaksana

Sumber : Kantor Kelurahan Sedinginan, Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel diatas, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa dari total keseluruhan laporan program yang penulis terima dari kantor Kelurahan Sedinginan, terdapat fakta bahwa masih ada beberapa program yang memang belum selesai proses pembangunannya, hal ini lah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk menganalisis penelitian ini yang bertujuan nantinya untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Kelurahan, dan bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan program-program tersebut.

Sementara itu, untuk menjalankan roda pemerintahan di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kelurahan mendapatkan anggaran modal yang jumlahnya bida dikatakan cukup besar, dimana untuk mengetahui jumlah anggaran tersebut, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1.2: Rincian Pendapatan Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2019.

No	Uraian	Rincian Perhitungan
----	--------	---------------------

		2019
1	Alokasi Dana Kelurahan	Rp. 584.420.000
2	Dana Kelurahan	Rp. 800.689.000
3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 31.055.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 100.000.000
Jumlah Pendapatan Kelurahan		Rp. 1.516.013.500

Sumber: Kantor Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Tahun 2019.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat di lihat bahwa Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih mendapatkan anggaran untuk menjalankan roda Pemerintahan Di Kelurahan Sedinginan total mencapai Rp. 1.516.013.500,- dengan jumlah tersebut, seharusnya seorang lurah sudah bisa membuat program-program yang dapat meningkatkan pembangunan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya, dan mengkoordinasikan pembangunan tersebut.

Dengan penyajian permasalahan yang terdapat pada latar belakang diatas, dan di dukung dengan penyajia data-data sekunder dalam penelitian ini, maka penulis berhasil melakukan analisis untuk menemukan fenomena-fenomena permasalahan yang dapat di tarik sebagai masalah, dimana fenomena dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Pra-Survey yang telah penulis lakukan di lapangan, ditemukan dugaan bahwa Lurah Sedinginan belum menjalankan Tugas dan Fungsinya dalam proses menjalin koordinasi terhadap lembaga-lembaha di lingkungannya dan juga masyarakat, baik itu Badan

Permusyawaratan Kelurahan, ataupun Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sedinginan. Hal ini didukung dengan temuan pra-survey penulis dilapangan yang memberikan gambaran dimana pelaksanaan pembangunan yang belum selesai dan ketidak tauan masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan di kampung mereka.

2. Diduga Lurah Sedinginan belum menjalankan fungsinya dalam mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan Masyarakat, hal ini juga di dasari dari data yang penulis dapatkan yang meunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan baik di lingkungan Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih.
3. Kurangnya transparansi proses penggunaan anggaran yang digunakan untuk pembangunan di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, hal ini dilihat dari fenomena dilapangan bahwa setiap melaksanakan pembangunan, proyek pembangunan tidak dilengkapi dengan pengumuman anggaran dan waktu penyelesaian kerja.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disajikan pada fenomena masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan latar belakang diatas serta fenomena yang telah disajikan, maka penulis menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “**Bagaimanakah Wewenang Lurah Dalam**

Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir” ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan utama dari penelitian adalah untuk:
 - a. Untuk menganalisis bagaimana Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi dihadapi oleh Lurah Sedinginan dalam mengkoordinasikan Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk:
 - a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya tentang proses koordinasi pembangunan yang dilakukan lurah di tingkat kelurahan.
 - b. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya dengan tujuan terkait dan juga sebagai masukan bagi mahasiswa/mahasiswi atau adek kelas penulis yang melakukan penelitian dibidang yang sama, khususnya tentang bagaimana lurah melakukan koordinasi dalam menjalankan proses pembagunan di tingkat Kelurahan.

- c. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak Kelurahan dalam menjalankan pembangunan dikelurahan, khususnya koordinasi yang dilakukan oleh lurah terhadap kelompok lembaga dan tokoh masyarakat di lingkungannya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Selanjutnya Syafie (2005;36) mendefinisikan ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga seta yang memerintah dengan yang diberikan perintah. Secara etimologis, definisi pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti: perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara segara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Munaf, 2016:47)

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga. Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai

usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Monarki, Aristokrasi, dan Demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kriteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan Nagara. Kelompok ajaran klasik tersebut pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian di lanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios. Sedangkan dalam teori modern, bentuk pemerintahan diberdakan antara bentuk monarkhi da republik, pembagian bentuk pemerintahan menjadi monarkhi dan republic, pertama kali dikemukakan oleh Machiavelli dalam bukunya yang berjudul "*II Principe*". Pada perkembangannya, secara umum bentuk pemerintahan yang banyak di adopsi ialah dari teori modern. (Munaf, 2016:47)

2. Konsep Kebijakan Pemerintahan

Menurut Federick (dalam Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan

tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, wahab (dalam Solichin, 2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi

Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno, 2009 : 11).

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain.

Kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa tingkatan:

- a. Kebijakan Nasional Yaitu kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN. Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan Presiden bersama-sama dengan DPR. Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan dapat berupa :

- 1) UUD 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dibuat oleh Presiden dalam hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR.

- b. Kebijaksanaan Umum

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan-ketentuan yang bersifat

garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, Ketetapan MPR maupun Undang-Undang guna mencapai tujuan nasional. Penetapan kebijaksanaan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijaksanaan umum tersebut adalah tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) serta Instruksi Presiden (Inpres). Sedangkan kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu Presiden yaitu para Menteri atau pejabat lain setingkat dengan Menteri dan Pimpinan LPND sesuai dengan kebijaksanaan pada tingkat atasnya serta perundangundangan berupa Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pejabat tersebut (Menteri/Pejabat LPND).

c. Strategi Kebijakan

Merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berupa Surat Keputusan yang mengatur tatalaksana kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan SDM. Pengertian strategi merupakan serangkaian sasaran organisasi yang kemudian mempengaruhi penentuan tindakan komprehensif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau alat dengan mana tujuan akan dicapai. (Islamy, 2009: 17)

3. Konsep Koordinasi.

Dewasa ini pelaksanaan pembangunan ditingkat desa-desa atau Kelurahan didaerah mendapat perhatian utama yang sekaligus sebagai subjek pembangunan. Oleh sebab itu wajar apabila pembangunan diwilayah kelurahan didaerah-daerah yang jauh dari kota besar mendapat penanganan yang serius dari aparat pemerintah. Pembangunan yang sudah direncanakan ditingkat pedesaan ataupun Kelurahan oleh aparat pemerintah sering tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari pemerintah kelurahan dalam proses pembangunan di Kelurahan itu sendiri.

Koordinasi menurut Chung dan Megginson (dalam Usman Husaini 2014:488) dapat didefinisikan sebagai proses motivasi, memimpin, dan mengkomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi.

Husaini, (2014:488) mendefinisikan koordinasi ialah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan. Sebagai kegiatan inter dan antar institusi-institusi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog dialog antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi.

Menurut Prof. Teery (dalam Syafiie, 2005;44) koordinasi adalah sinkronisasi tertib upaya untuk memberikan jumlah waktu, yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan menghasilkan tindakan harmonis.

Menurut Prof. Mooney (dalam safiie, 2005;23) koordinasi adalah *coordination, therefore, is the orderly arrangement group effort to provide unity of action in the pursuit of a common purpose.*

Menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

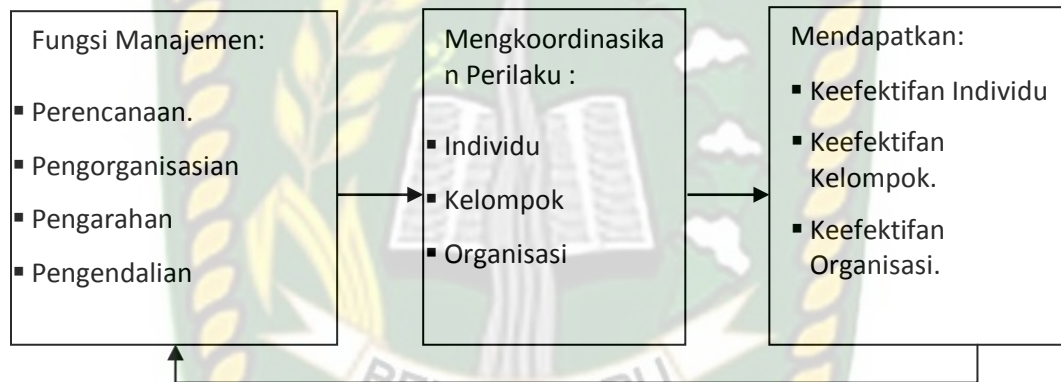
Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007;85).

Berdasarkan pendapat para pakar di atas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses mengintegritaskan (memadukan), menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian tidak akan dapat melihat peran mereka dalam suatu organisasi. Mereka akan terbawa untuk mengikuti kepentingan-kepentingan sendiri (ego sektoral) dan bahkan sampai mengorbankan sasaran-sasaran organisasi yang lebih luas. (Husaini 2014:488)

Koordinasi ialah kerja sama antara dua orang atau lebih. Istilah kooperasi, gotong royong, kerja tim (*team work*) dan jaringan kerja (*net working*) adalah istilah yang maknanya sama, yaitu adanya kerja sama antara dua orang atau lebih. Apabila kerja sama mereka sudah terpadu (*terintegritas*) barulah terjadi koordinasinya. Koordinasi hampir sama dengan sinergi. Sinergi ialah hasil bekerja bersama-sama lebih besar dari pada bekerja secara sendiri. Husaini (2014:488)

Hakikat Pekerjaan seseorang manajer menurut Gibson, Et al (dalam Husaini 2014:491) adalah mengkoordinasikan tugas individu, kelompok, dan organisasi dengan empat fungsi manajemen, yaitu *Planing*, *Organizing*, *Directing*, dan *Controlling* untuk mencapai tujuan individu, kelompok dan organisasi secara efektif. Untuk memperjelas pernyataan di atas, Gibson menggambarannya sebagai Berikut.

Gambar II.I Kontribusi Manajemen Terhadap Keefektifan dalam Koordinasi.



Menurut Husaini 2014:488 terdapat tiga macam keadaan yang saling bergantung (*interdependence*) di antara unit-unit organisasi, yaitu (1) keadaan saling bergantung yang di satukan (*pooped interpedence*), (2) Keadaan saling bergantung berurutan (*sequential interpedence*), dan (3) keadaan saling bergantung timbale balik (*reciprocal interdependence*).

Koordinasi dapat dibedakan atas (1) koordinasi hierarkis (*vertical*), yang dilakukan oleh pejabat pemimpin dalam suatu instansi terhadap pejabat atau instansi di bawahnya; (2) koordinasi fungsional, yang dilakukan oleh pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya saling

berkaitan berdasarkan asas fungsional. Koordinasi ini dapat di bedakan atas koordinasi fungsional horizontal, diagonal, dan territorial.

Koordinasi fungsional horizontal dilakukan oleh seorang atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang setingkat. Koordinasi fungsional diagonal dilakukan oleh seorang pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang berada dalam wilayah tersebut menjadi tanggung jawabnya (Husaini 2014;488).

Koordinasi adalah poses pemaduan sasara dan kegiatan unit-unit kerja (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Tanpa koordinasi, para individu dan bagian-bagian akan kehilangan pemahaman akan peran mereka di dalam organisasi dan tergoda untuk mengejar kepentingan khusus mereka sendiri, seringkali dengan mengorbankan tujuan organisasi yang lebih besar. James Stoner & Edwar Freeman (1994 ; 501)

Luasnya kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan perlunya komunikasi dari tugas-tugas yang dilakukan dan tingkat kesalingtergantungan berbagai unit yang menjalankan tugas-tugas tersebut. Apabila tugas-tugas tersebut memerlukan atau dapat memperoleh manfaat dari arus informasi antar unit, maka yang dapat di peroleh manfaat dari arus informasi antar unit, maka yang terbaik adalah tingkat koordinasi yang tinggi.

Tetapi apabila kebutuhan atau manfaat sedemikian sedemikian itu tidak ada, maka pekerjaan itu mungkin lebih baik diselesaikan apabila tidak banyak waktu yang diperlukan dalam interaksi dengan anggota dari unit-unit lainnya. Koordinasi yang tinggi kemungkinan besar juga akan mermanfaat bagi pekerjaan

yang tidak rutin dan tidak dapat diprakirakan sebelumnya, bagi pekerjaan dimana factor-faktor dalam lingkungan yang berubah, dan bagi pekerjaan dimana kebergantungan tugas adalah tinggi (sebagai contoh, apabila sebuah unit tidak dapat berfungsi tanpa memperoleh informasi atau komponen produk dari unit lain). Suatu tingkat koordinasi yang tinggi juga diperlukan bagi perusahaan yang menetapkan sasaran prestasi yang tinggi.

Koordinasi Pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak di capai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara dan garis-garis besar haluan pembangunan baik untuk tingkat pusat ataupun untuk tingkat daerah, Guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya kegiatan.

Yang dimaksud pengendalian disini adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian karya dengan rencana, program, perintah-perintah, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau penyimpangan. Proses pengendalian menghasilkan data-data dan fakta-fakta baru yang terjadi dalam pelaksanaan, ini semua berguna bagi pimpinan perencanaan dan pelaksanaan. Apa yang telah direncanakan, diprogramkan tidak selalu cocok dengan kenyataan operasionalnya dalam rangka inilah pengendalian berguna sekali bagi perencanaan selanjutnya. Selama pekerjaan berjalan, pengendalian digunakan sebagai pejaga dan pengaman. Dalam hal ini pengendalian berguna bagi keperluan koreksi pelaksanaan operasional, sehingga tujuan haluan tidak menyimpang dari rencana.

Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, koordinasi bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan.

Menurut G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2007:85) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Sementara itu, Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Handayaniingrat (1985:88) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaniingrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan

(leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

3.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Koordinasi.

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah, Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin. Untuk mengetahui secara lengkapnya, maka akan penulis sajikan penjelasannya sebagai berikut:

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar

ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikan kepada orang tersebut.

- c. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

d. Disiplin

Pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku”. Jadi jelas bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan

mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2003;89-90) antara lain adalah:

a. Perencanaan

Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik dan terincinya rencana, maka akan semakin mudah melakukan koordinasi. Jika perencanaan disusun dengan baik dan hubungan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek terintegrasi dengan baik serta harmonis maka penerapan koordinasi akan lebih mudah.

b. Pengorganisasian

Jika pengorganisasiannya baik, maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah. Organisasi yang baik apabila hubungan-hubungan antara individu berjalan dengan baik, hubungan pekerjaan akan baik dan job description setiap pejabat jelas.

c. Pengarahan

Pengarahan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dalam insensitas *directing force* akan membantu menciptakan koordinasi.

d. Pengisian Jabatan

Jika setiap pejabat sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya maka koordinasi akan lebih mudah.

e. Pengendalian

Pengendalian berhubungan langsung dengan koordinasi. Penilaian yang terus menerus atas kemajuan pekerjaan akan membantu penyesuaian usaha-usaha sehingga tujuan yang ditentukan semula dihasilkan, diperoleh dan dicapai dengan baik, dengan demikian tindakan-tindakan perbaikan yang terjadi karena pengendalian membantu dalam mendapatkan koordinasi yang dibutuhkan.

4. Konsep Kewenangan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Hidjaz, (2010:35)

Menurut H.D Stout (dalam Ridwan HR, 2013:71) Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek (dalam Ridwan HR, 2013:71) menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1 Sumber Kewenangan

Indroharto, (1993:68) Mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak

terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Philipus M. Hadjon, (dalam Ridwan HR, 2013:108-109) mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Kemudian pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*".

Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

5. Konsep Pembangunan.

Secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan menurut (Nugroho dan Rochmin 2004) adalah suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusia.

Sedangkan menurut Siagian (2007:28) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Menurut Soekanto (2006:437) pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan dikehendaki. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi prosesnya perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

a. Tujuan pembangunan

1. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan pembangunan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendekatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, secara tidak langsung

adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

2. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia.

3. Tujuan Secara Spasial

Tujuan pembangunan spasial adalah terciptanya kawasan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, dan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

b. Beberapa Model Pembangunan

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethno development*) (Kuncoro, 2003).

Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*.

1. *Economic growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan) Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:
 - 1) Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM;
 - 2) Peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas;

- 3) Kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.
2. *Basic needs* (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan)
Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.
3. *People centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia)
Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial.

Contoh dari model ini, adalah empowering/ pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dengan penelitian yang terdahulu, dan juga menjadikannya sebagai acuan atau referensi.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait dengan penelitian yang berjudul Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

1	Nama	:	Daniel Filterianto Robial Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan
	Judul Penelitian	:	Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe)
	Persamaan Penelitian	:	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini adalah pembahasan yang sama dibidang Pemanfaatan wewenang kelurahan dalam menjalankan roda pemerintahan.
	Perbedaan Penelitian		
	Fenomena Penelitian	:	➤ Fenomena Penelitian ini adalah permasalahan pada peran pemerintah kelurahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya di kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. ➤ Sementara fenomena yang ada pada penelitian penulis adalah belum berjalannya sistem pelaksanaan program yang terdapat pada Pemerintahan Kelurahan Sedinginan, di duga hal ini berkaitan dengan sistem koordinasi yang belum berjalan dengan baik dilingkungan pemerintahan.
	Teori Penelitian	:	➤ Konsep teori yang digunakan oleh Peneliti terdahulu adalah teori dari (Soekamto, 1984:237 dalam buku Soeharto, 2002;101), Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya.

		➤ Konsep teori yang penulis gunakan adalah teor tentang koordinasi yang memfokuskan koordinasi antara lembaha Pemerintahan Kelurahan dengan kelompok disekitarnya.
Metode Penelitian	:	➤ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dihimpun di reduksi dan kategorisasi sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Informan yang dipilih adalah lurah, sekretaris lurah, staf, dan masyarakat kelurahan, khususnya masyarakat pengguna jasa layanan kelurahan Sawang Bendar. ➤ Sementara itu, penulis menggunakan metode penelitian tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif. Creswell (2016: 4)
Lokasi Penelitian	:	➤ Lokasi Penelitian Terdahulu berada di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe. ➤ Sementara itu, Lokasi Penelitian Penulis Berada di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
Temuan Penelitian	:	➤ Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya yang terkait dengan prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintahan, belum dilakukan oleh lurah di Sawang Bendar. Penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparan

		➤ Transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya di kelurahan Sawang Bendar. Masih adanya perbedaan atau sikap pilih kasih dalam pelayanan kepada masyarakat, kecenderungan lurah melakukan pembelaan bagi warga yang mempunyai power di masyarakat, misalnya bagi mereka yang mempunyai banyak uang.
2	Nama :	Rahmat Nur dan Monalisa Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan
	Judul Penelitian :	Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
	Persamaan Penelitian :	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini adalah pembahasan yang sama dibidang Pemanfaatan wewenang pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Perbedaan Penelitian		
	Fenomena Penelitian :	➤ Fenomena Penelitian ini adalah kurang optimalnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Camat, serta tidak ada keterlibatan masyarakat dalam mengikuti program Pemerintahan Camat. ➤ Sementara fenomena yang ada pada penelitian penulis adalah belum berjalannya sistem pelaksanaan program yang terdapat pada Pemerintahan Kelurahan Sedinginan, di duga hal ini berkaitan dengan sistem koordinasi yang belum berjalan dengan baik dilingkungan pemerintahan.
	Teori Penelitian :	➤ Konsep teori yang digunakan oleh Peneliti terdahulu adalah teori dari Hidayat Syarief (2014:106) tentang otonomi daerah. ➤ Konsep teori yang penulis gunakan adalah teor tentang koordinasi yang memfokuskan koordinasi antara lembaga Pemerintahan Kelurahan dengan kelompok disekitarnya.

Metode Penelitian	:	➤ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dihimpun di reduksi dan kategorisasi sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Informan yang dipilih adalah lurah, sekretaris lurah, staf, dan masyarakat kelurahan, khususnya masyarakat pengguna jasa layanan kelurahan Sawang Bendara ➤ Sementara itu, penulis menggunakan metode penelitian tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif. Creswell (2016: 4)
Lokasi Penelitian	:	➤ Lokasi Penelitian Terdahulu berada di Kecamatan Bangko Pusako. ➤ Sementara itu, Lokasi Penelitian Penulis Berada di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
Temuan Penelitian	:	➤ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurang optimalnya pemanfaatan partisipasi masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan, tidak dapat disangkal bahwa sebegitu jauh penyerapan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih belum dapat dilakukan secara baik dan optimal. Walaupun Musrenbang Kecamatan sebagai wadah untuk menyerap partisipasi masyarakat yang sudah ada dan dilakukan secara berkala, namun demikian sebegitu jauh pelaksanaannya terkesan hanya bersifat formalitas belaka.

3	Nama	:	Ahmad Rais Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara
	Judul Penelitian	:	Analisis Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan (Studi Kasus Tentang Fungsi Koordinasi Camat) Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
	Persamaan Penelitian	:	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini adalah pembahasan yang sama dibidang Pemanfaatan wewenang pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.
	Perbedaan Penelitian		
	Fenomena Penelitian	:	➤ Tugas umum dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan jarang dilakukan oleh camat yang disebabkan banyaknya tugas camat untuk mengkoordinasikan tugasnya tersebut, dalam melaksanakan koordinasi tersebut biasanya camat melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Koramil dan polsek hal ini dilakukan camat sebagai salah satu tugasnya guna menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan selain itu camat juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjalankan pembangunan di setiap desa yang ada di wilayah kerjanya. ➤ Sementara fenomena yang ada pada penelitian penulis adalah belum berjalannya sistem pelaksanaan program yang terdapat pada Pemerintahan Kelurahan Sedinginan, di duga hal ini berkaitan dengan sistem koordinasi yang belum berjalan dengan baik dilingkungan pemerintahan.
	Teori Penelitian	:	➤ Konsep yang digunakan oleh Peneliti terdahulu adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 ➤ Konsep teori yang penulis gunakan adalah teori tentang

			koordinasi yang memfokuskan koordinasi antara lembaga Pemerintahan Kelurahan dengan kelompok disekitarnya.
	Metode Penelitian	:	➤ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dihimpun di reduksi dan kategorisasi sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Informan yang dipilih adalah lurah, sekretaris lurah, staf, dan masyarakat kelurahan, khususnya masyarakat pengguna jasa layanan kelurahan Sawang Bendara ➤ Sementara itu, penulis menggunakan metode penelitian tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif. Creswell (2016: 4)
	Lokasi Penelitian	:	➤ Lokasi Penelitian Terdahulu berada di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. ➤ Sementara itu, Lokasi Penelitian Penulis Berada di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
	Temuan Penelitian	:	➤ Analisis Koordinasi Tugas Umum Pemerintahan (Studi Kasus Tentang Fungsi Koordinasi Camat) di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.dapat dikategorikan cukup baik
4	Nama	:	Nofela Sari Mitra Susana Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan

Judul Penelitian	:	Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
Persamaan Penelitian	:	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini adalah pembahasan yang sama dibidang Pemanfaatan wewenang pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Perberdaan Penelitian		
Fenomena Penelitian	:	➤ Kurangnya koordinasi pihak Pemerintahan kepada lembaga masyarakat termasuk tidak adanya aspirasi masyarakat yang ikut berkontribusi pada pembangunan di Kulurahan Guntung. ➤ Sementara fenomena yang ada pada penelitian penulis adalah belum berjalannya sistem pelaksanaan program yang terdapat pada Pemerintahan Kelurahan Sedinginan, di duga hal ini berkaitan dengan sistem koordinasi yang belum berjalan dengan baik dilingkungan pemerintahan.
Teori Penelitian	:	➤ Konsep yang digunakan oleh Peneliti terdahulu adalah menurut Sondang P. Siagian (2001: 110) tentang tujuan koordinasi. ➤ Konsep teori yang penulis gunakan adalah teori tentang koordinasi yang memfokuskan koordinasi antara lembaga Pemerintahan Kelurahan dengan kelompok disekitarnya.
Metode Penelitian	:	➤ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dihimpun di reduksi dan kategorisasi sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Informan yang dipilih adalah lurah, sekretaris lurah, staf, dan masyarakat kelurahan, khususnya masyarakat pengguna jasa layanan kelurahan Sawang Bendara ➤ Sementara itu, penulis menggunakan metode penelitian tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif,

		penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif. Creswell (2016: 4)
	Lokasi Penelitian	: ➤ Lokasi Penelitian Terdahulu berada di Kelurahan Guntung ➤ Sementara itu, Lokasi Penelitian Penulis Berada di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
	Temuan Penelitian	: ➤ Hasil pembangunan yang telah dicapai hendaknya dipelihara secara baik oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Diharapkan juga Pemerintah dapat lebih meningkatkan pembangunan-pembangunan fisik yang lebih diperlukan oleh masyarakat misalnya pembangunan jalan, pembuatan pospos ronda dan sebagainya demi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Guntung.
5	Nama	: Nitreesilia Rohsyani Saroinsong Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan
	Judul Penelitian	: Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara
	Persamaan Penelitian	: Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan saat ini adalah pembahasan yang sama dibidang Pemanfaatan wewenang pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan.
	Perberdaan Penelitian	

Fenomena Penelitian	:	➤ Beberapa indikasi permasalahan dan pemikiran tersebut perlu dikaji melalui suatu penelitian ilmiah, sehingga itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “Koordinasi” program-program pembangunan di kecamatan. Koordinasi Camat dalam pembangunan di kecamatan meliputi : (a) pengkoordinasian perencanaan pembangunan, dan (b) pengkoordinasian pelaksanaan program-program yang sudah ditetapkan. ➤ Sementara fenomena yang ada pada penelitian penulis adalah belum berjalannya sistem pelaksanaan program yang terdapat pada Pemerintahan Kelurahan Sedinginan, di duga hal ini berkaitan dengan sistem koordinasi yang belum berjalan dengan baik dilingkungan pemerintahan.
Teori Penelitian	:	➤ Konsep yang digunakan oleh Peneliti terdahulu adalah berdasarkan konsep koordinasi berdasarkan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006). ➤ Konsep teori yang penulis gunakan adalah teori tentang koordinasi yang memfokuskan koordinasi antara lembaga Pemerintahan Kelurahan dengan kelompok disekitarnya.
Metode Penelitian	:	➤ Penelitian ini menggunakan penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian deskriptif-kualitatif. ➤ Sementara itu, penulis menggunakan metode penelitian tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif. Creswell (2016: 4)

Lokasi Penelitian	:	➤ Lokasi Penelitian Terdahulu berada di Kabupaten Minahasa Utara) ➤ Sementara itu, Lokasi Penelitian Penulis Berada di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
Temuan Penelitian	:	➤ Koordinasi Camat terhadap perencanaan program/kegiatan pembangunan di kecamatan Kauditan dilakukan dengan baik dan cukup efektif dalam beberapa bentuk atau cara yaitu: meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara unsur pimpinan kecamatan atau Tripika dan dengan unit-unit kerja yang ada dan dengan pemerintah desa di dalam perencanaan pembangunan melalui forum-forum koordinasi perencanaan pembangunan kecamatan; melakukan pembinaan dan pengarahan kepada semua unit kerja yang ada di wilayah kerja kecamatan di dalam perencanaan pembangunan, termasuk kepada pemerintah dan lembaga masyarakat di desa.

Sumber : *Olahan Penulis, Tahun 2020*

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori.

Gambar II.2 : Kerangka Pikran Penelitian Tentang Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.



Sumber: Modifikasi penelitian 2020.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dalam meneliti, maka dijabarkan konsep operasioanal untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan judul penelitian, Adapun konsep-konsep operasional variabel penelitian ini adalah :

1. Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.
2. Kebijakan (*policy term*) digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi.
3. Koordinasi ialah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan. Sebagai kegiatan inter dan antar institusi-institusi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog dialog antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi.
4. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
5. Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

6. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.
7. Wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
9. Untuk mencapai koordinasi yang efektif, maka dibutuhkan fungsi manajemen di dalam pengorganisasiannya, dimana menurut Husaini, (2014:491), fungsi tersebut adalah:
 - a. Perencanaan (*Planing*)
 - b. Pengorganisasian (*Organizing*)
 - c. Pengarahan (*Directing*)
 - d. Pengendalian (*Conntrolling*)

E. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Definisi operasional

variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Terry (dalam Hasibuan, 2014:85)	Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan.	1. Perencanaan (<i>Planing</i>)	a. Penyusunan program Kerja. b. Penyusunan anggaran. c. Penentuan Waktu Pelaksanaan.
		2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	a. Menentukan tim / kelompok kerja. b. Menentukan wewenang masing-masing kelompok kerja. c. Melibatkan Kelompok Masyarakat dalam penyusunan program.
		3. Pengarahan (<i>Directing</i>)	a. Memberikan Pengarahan terkait program kerja. b. Memberikan Motivasi Kerja. c. Lurah selalu Terbuka untuk memberikan arahan.
		4. Pengendalian (<i>Conntrolling</i>)	a. Melakukan pengawasan terhadap program pembangunan. b. Melakukan Evaluasi terhadap hasil kerja tim. c. Penerapan sistem sanksi.

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif. Creswell (2016: 4). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Kantor Kelurahan Sedinginan, adapun alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut di dasari pada permasalahan yang menjadi fenomena-fenomena pada penelitian ini, dimana fenomena tersebut diantaranya pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh lurah dianggap belum berjalan dengan baik, hal ini di dukung dengan data pelaksanaan program yang belum berjalan dengan maksimal atau tidak selesai dilaksanakan tepat dengan estimasi waktu yang ditetapkan.

C. Informan Penelitian

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Key informan* atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Dan untuk melihat informan di dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan penjelasan seperti dibawah ini:

Tabel III.1 : Jumlah Key informan dalam penelitian tentang Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

No	Subjek		Informan
1	Lurah Sedinginan.		1
2	Sekretaris Kelurahan.		1
3	Kaur Pembangunan.		1
4	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).		1
5	Tokoh Masyarakat Sedinginan	1. Kepala Adat	3
		2. Ketua Pemuda	
		3. Ketua RT/RW	
Jumlah			7

Sumber : Olahan Penulis tahun 2020

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian.

Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini Informan penelitian yaitu Lurah Sedinginan, Sekretaris Kelurahan Sedinginan, Kaur Pembangunan, Ketua LPM, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat (Kepala Adat, Ketua Pemuda, Ketua RT/RW).

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Kelurahan Sedinginan, adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Kelurahan Sedinginan.
- d. Salinan Data terkait dengan profil informan penelitian yang akan penulis lakukan.
- e. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur

(misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.

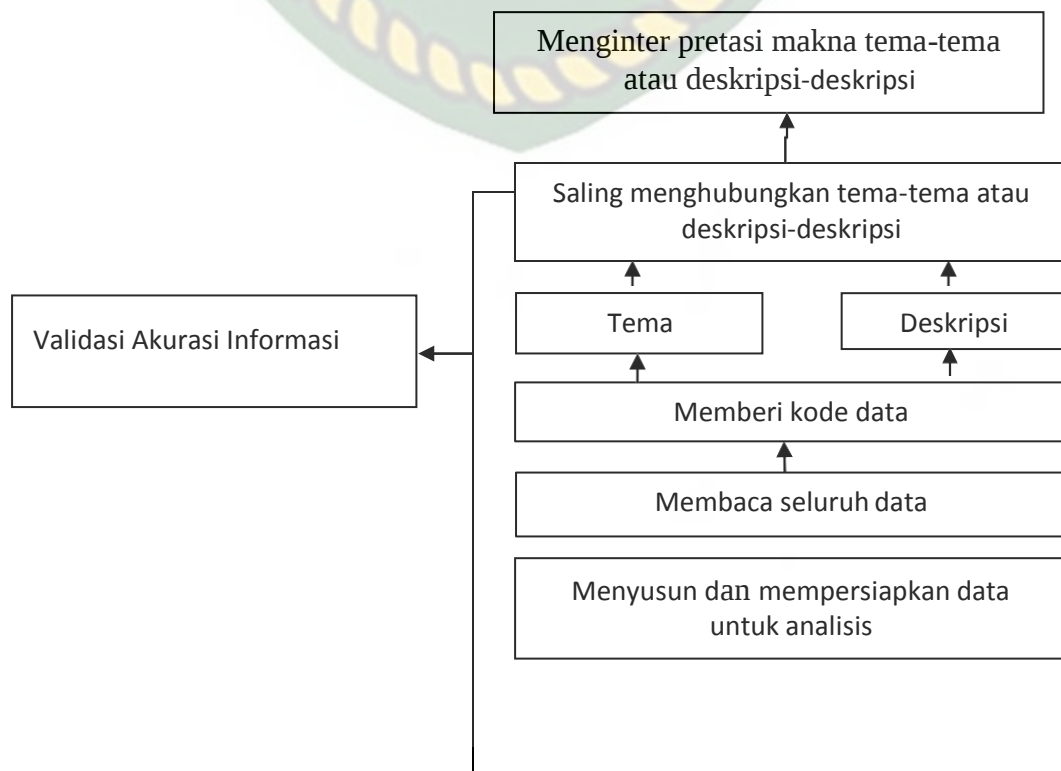
- 4) Melangsungkan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.
 - 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.
 - 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
 - 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
- c. Dokumentasi

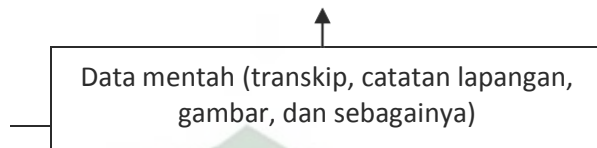
Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016:263), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif berikut:

Gambar III.1 Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.





Gambar 3.1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell

Gambar III.1 diatas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang disajikan. Gambar III.1 diatas disajikan lebih detail oleh Creswell dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu.
3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan

selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kaimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam katergori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.
5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

[illegible]

[illegible]

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir.

1. Sejarah Dan Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah di kenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota, tepatnya di jalan merdeka No. 58 Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan luas wilayah 8.881, 59 KM2, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Kanpar dan Bengkalis, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur dengan Kota Dumai.

Wilayah Rokan Hilir dialiri beberpa sungai, berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai, sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat di layari perahu, perahu motor (pompong) kapal motor, penelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai Rokan, adapun sungai-sungai tersebut adalah; Sungai Rokan, Sungai

Duku, Sungai Ular, Sungai Tengger, Sungai Tengger, Sungai Siandun, Sungai Daun, Sungai Agas, Sungai Bangko dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah sungai Rokan, yang panjangnya sekitar 350 KM.

Seperti layaknya daerah yang ada di Provinsi Riau yang letaknya di tengah-tengah pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, secara geografis letak Kabupaten Rokan Hilir di garis Khatulistiwa beriklim tropis dan mempunyai curah hujan yang ⁶¹ . Berdasarkan data tahun 2008 curah hujan di kabupaten Rokan Hilir mencapai 215,3 mm/tahun dengan temperatur antara 26 – 32. Berdasarkan data yang ada menunjukkan hampir 52 rata-rata pada tahun 2008. Melihat keadaan ini berarti musim kering di daerah ini lebih panjang dari musim penghujan. Musim kering hampir terjadi rata-rata dalam satu tahun mencapai tujuh bulan sedangkan musim penghujan lima bulan.

Curah hujan di Kabupaten Rokan Hilir ini terdiri dari dataran rendah dan sebagian lagi dataran tinggi, daerah yang datarannya rendah adalah sebelah utara, daerah ini terdiri dari rawa-rawa dan merupakan pembentukan delta, sedangkan wilayah selatan merupakan daerah dataran tinggi, kemudian daerah Kabupaten Rokan Hilir, selain mempunyai daerah datar juga terdiri dari daerah pesisir dan pulau, pulau-pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyebar di beberapa kecamatan yaitu; Kecamatan Kubu terdapat Pulau Halang, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai di antara sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah sungai Rokan, panjang

Sungai Rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer, sungai ini dapat di layari sampai ke hulu, artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga di gunkan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sunga sebagai penuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci menjadi bahan tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air (ikan, ketem, dan lain-lain).

Sungai Rokan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir sudah tidak asing lagi, dimana sungai ini merupakan sumber aspirasi dan sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya, keadaan muara Sungai Rokan terjadi pendangkalan, karena adanya erosi di daerah hulu yang mengakibatkan terbentuknya delta, Lebar sungai Rokan hanya tinggal beberapa meter saja, sungai bagi masyarakat Melayu adalah mempunyai beberapa peranan, seperti sebagai sarana transportasi (jalan raya sebelum adanya jalan darat) untuk menghubungkan satu kawasan pemukiman yang satu dengan yang lain, sumber kehidupan, tempat untuk bermain, Peran yang sangat penting yaitu pengembangan teknologi local seperti pembuatan alat transportasi, penangkapan ikan dan sebagai tempat untuk berinovasi dan kreativitas anak-anak yang tinggal di bantaran sungai tersebut, jika sungai Rokan hilang maka hilanglah kata, bahasa, tradisisi, adat dan budaya. Artinya potensi yang bersumber dari air yang bernama Sungai Rokan sudah hilang di Bumi Negeri Seribu Qubah. oleh karena itu, agar identitas, jati diri serta potensi dari Sungai Rokan terus berkembang, jaga keberadaan sungai tersebut, melalui pelestarian hutan dan Bandar di daerah hulu. Jika hulu rusak, maka hilir juga rusak, apabila hulu baik, maka hilir juga baik, untuk itu, pemimpin daerah yang berada di daerah aliran sungai (DAS), perlu melakukan koordinasi dan

sinkronisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kekayaan hari ini juga dinikmati oleh generasi berikutnya.

Pada tahun 2010 BPS melaksanakan Sensus Penduduk yang dilaksanakan serentak pada bulan Mei 2010 di seluruh wilayah Republik Indonesia, Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 adalah 618.355 jiwa, terdiri dari 318.779 jiwa laki-laki dan 299.576 jiwa perempuan. Hingga rasionya adalah 106,41 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 106 penduduk laki-laki.

Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah dengan penduduk sebanyak 143.1770 jiwa atau 23,25 persen. Sedang yang terkecil di Kecamatan Rantau Kopar dengan penduduk 5.502 jiwa atau 0,92 persen dari seluruh penduduk Rokan Hilir. Berikut jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Rokan Hilir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	2	3	4
1	Tanah Putih	64.952	10.50
2	Pujud	74.826	12.10
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	14.887	2.41
4	Rantau Kopar	5.785	0.94
5	Bagan Sinembah	143.770	23.25
6	Simpang Kanan	28.320	4.58
7	Kubu	20.975	3.39
8	Pasir Limau Kapas	36.454	5.90

9	Kubu Babussalam	20.181	3.26
10	Bangko	73.360	11.86
11	Sinaboi	12.413	2.01
12	Batu Hampar	8.271	1.34
13	Pekaitan	14.962	2.42
14	Rimba Melintang	35.067	5.67
15	Bangko Pusako	64.142	10.37
Jumlah		618.355	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir 2015

Dengan kawasan perairan yang sangat berpotensi, Kabupaten Rokan Hilir memiliki beranekaragam potensi di sektor perikanan antara lain ikan patin, udang, kerang, cumi-cumi, dan jenis makanan laut lainnya seperti penyu hijau, tiram, siput, dan rumput laut. Letak geografis Kabupaten Rokan Hilir terletak di batas-batas wilayah berikut ini :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa Sungai dan Pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar dan terpanjang yang melintas sejauh 350 Km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar dan terpanjang, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Kabupaen Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama disepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya.

Kabupaten Rokan Hilir dengan Ibukota Bagansiapi-api telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Menurut hasil sensus 2014, jumlah populasi Kabupaten Rokan Hilir adalah 421.310 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata adalah 48,33 jiwa/km² nya. Kabupaten Rokan Hilir didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Dewasa ini telah terjadi berbagai perubahan pada wilayah Kabupaten Rokan Hilir khususnya Bagansiapi-api yaitu perubahan mencakup 3 hal yang meliputi modernisasi, komersialisasi dan globalisasi: Namun ketiga hal ini bagi magnet yang memberi janji-janji sungguh menggiurkan, namun perencana dan pemikir yang kritis juga cukup khawatir akan perangkap-perangkap yang menghadangnya.

Rokan Hilir semakin berkembang setelah membangun pelabuhan modern dan terlengkap yang terletak di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka. Bagansiapi-api merupakan sebuah perkampungan ikan yang berada pada pantai timur pulau sumatera hasil produksinya seperti ikan asin dan udang diekspor keseluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kota Bagansiapi-api pernah tercatat dalam sejarah Perikanan Internasional berhasil menduduki penghasil ikan nomor 2 (dua) setelah Norwegia dan Peru 1 Lebih dari 50% ekonomi kabupaten ini berasal dari sektor pertanian, khususnya dari bagian sektor perkebunan, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan. Sektor lain yang

memberikan kontribusi besar adalah perdagangan, hotel dan restoran, khususnya pada sektor perdagangan.

Sejak berlakunya otonomi daerah, Kabupaten Rokan Hilir telah mempersiapkan sarana dan infrastruktur baru seperti:

- a. Transportasi Darat (1.828 km mudah diakses dengan kendaraan roda empat).
- b. Transportasi Udara (4 pelabuhan ekspor-impor), pada 4 lokasi yaitu; Bagan Siapi-api, Panipahan, Tanjung Lumba-lumba dan Sinaboi.
- c. Listrik - 26 unit pembangkit listrik tenaga diesel dengan total kapasitas 29.372.616 kWh
- d. Telekomunikasi (telepon rumah, telepon genggam dan internet)
- e. Fasilitas Kesehatan (3 Rumah Sakit, 10 Puskesmas, dan 58 Puskesmas Pembantu).
- f. Air bersih, dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM) dengan jumlah volume 9.840 m³.
- g. Fasilitas pendukung; Perbankan (Bank Nasional dan Bank Lokal), Akomodasi (Hotel dan Fasilitas Pemandokan).

Dari sisi pariwisata dan kebudayaan Rokan Hilir khususnya bagan siapi-api adalah wilayah wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara maupun lokal, selain pemandangan alam di pulau jemur yang berada kurang lebih 45 mil dari bagan siapi-api, danau napangga terletak di kecamatan tanah putih kurang lebih 70 km dari ujung tanjung, pulau tilan berada 20 km dari ujung tanjung dan tanah putih atau melalui dumai, sungai Rokan merupakan gelombang yang indah dengan menyatunya gelombang laut dari desa

rantau bais yang posisinya berhadapan dengan pulau tilan dibatasi oleh sungai rokan, Desa bantayan terkenal dengan batu belah batu betangkup dikenal sebagai mitos atau folklor atau mengandung legenda tentang seorang ibu yang kecewa melihat kedurhakaan anaknya sampai sang ibu bunuh diri dengan membiarkan dirinya ditelan batu belah itu kemudian pulau jemur terletak kurang lebih 45 mil dari bagan siapi- api, pulau ini dikenal sebagai salah satu gugusan pulau yang sangat kaya dengan hasil telur penyu dan sarang burung walet, ditengarai mengandung deposit minyak bumi yang besar. Disamping potensi wisata bahari yang siap dikembangkan Kabupaten Rokan Hilir.

2. Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan undang-undang no. 53 tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang ini, ibu kotanya adalah ujung tanjung, namun aspirasi masyarakat dan pemerintah, Kabupaten Rokan Hilir menghendaki agar ibukota ditetapkan di bagan siapi-api, hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti untuk menjangkau daerah-daerah pesisir, menghidupkan kembali kota bagan siapi-api sebagai kota sejarah, yang pernah menjadi ibu kota provinsi bangko semasa kerajaan siak sri indrapura, bagan siapi-api sebagai kota penghasil ikan dunia pada masa lalu, berdasarkan berbagai alasan itu, maka kota bagan siapi-api ditunjuk sebagai ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir, alasan lain adalah sarana dan prasarana di kota bagan siapi-api sudah memadai bila dibandingkan di daerah lain, pada awal berdiri kabupaten rokan hilir terdiri dari lima kecamatan:

1. Kecamatan Tanah Putih
2. Kecamatan Kubu

3. Kecamatan Bagan Sinembah
4. Kecamatan Bangko dan
5. Kecamatan Rimba Melintang

Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terbagi dalam 7 kelurahan, 71 Desa dan 11 Desa persiapan, pada saat itu, tingkat perkembangan Desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 1 Desa swadaya, 9 Desa swakarya, 68 Desa swasembada dan 11 Desa persiapan, setelah hampir dua belas tahun berdiri Kabupaten Rokan Hilir, telah dibentuk 14 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.1 dibawah ini:

Table 4.2: Kecamatan, Ibukota Dan Luas Wilayah Yang Berada Di Kabupaten Rokan Hilir

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah	Persentase
1.	Tanah Putih	Sedinginan	1.915.23	21.56
2.	Pujud	Pujud	984.90	11.09
3.	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	198.39	
4.	Rantau Kopar	Rantau Kopar	231.13	2.60
5.	Bagan Sinembah	Bagan Batu	847.35	9.54
6.	Simpang Kanan	Simpang Kanan	445.55	5.02
7.	Kubu	Teluk Merbau	1,061.06	11.95
8.	Panipahan	Panipahan	669.63	7.54
9.	Bangko	Bagansiapiapi	475.26	5.35
10.	Sinaboi	Sinaboi	335.48	3.78

11.	Batu Hampar	Bantayan	284.31	3.20
12.	Pekaitan	Pedamaran	465.30	5.24
13.	Rimba Melintang	Rimba Melintang	235.48	2.65
14.	Bangko Pusako	Bangko Kanan	732.52	8.25
Jumlah			8.881.59	100.000

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2013*

Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah kabupaten yang terbaru, secara administrasi telah menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2007 organisasi perangkat daerah di bentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, padatahun 2011 usia Kabupaten Rokan Hilir memasuki tahun yang ke 12 (kedua belas tahun), pada tahun ini juga perodesasi dari pemerintahan secara otonom telah memasuki tahap ke II (tahun ke enam), untuk itu Pemerintah Rokan Hilir menyusun rancangan pembangunan jangka menengah tahun ke enam perodesasi kedua. rancangan pembangunan jangka menengah ini merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (SKPD = Organisasi Perangkat Daerah).

Sumber daya aparat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data yang tersedia dari BPS berjumlah 4. 267, yang tersebar pada 42 Dinas, instansi dan kantor, apabila dilihat dari jenjang pendidikannya sebagian besar adalah berpendidikan diploma dan sekolah menengah, untuk aparatur yang

berpendidikan sarjana (Strata dua dan Strata satu) hanya 19.40%. keadaan ini memberikan gambaran bahwa masih di perlukan peningkatan kualitas pendidikan bagi aparat pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, terutama untuk pendidikan formal yang mengarah pada aparatur pemikir untuk merancang pengembangan Kabupaten Rokan Hilir yang sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Rokan Hilir

B. Gambaran Umum Kecamatan Tanah Putih

Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, luas wilayahnya 1.934,01 Km² dengan pusat pemerintahan Kecamatan Tanah Putih berada di desa Sedinginan. Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Tanah Putih terdiri dari 17 Kelurahan.

Dilihat dari bentang wilayahnya, Kecamatan Tanah Putih berbatasan dengan wilayah-wilayah disekitarnya, diantaranya adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rimbo Melintang
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pujud
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau Kopar

Secara geografis Kecamatan Tanah Putih berada pada jalur lintas Sumatera dan daerah aliran sungai Rokan. Untuk mata pencaharian penduduk, diantaranya sebagai nelayan, petani, pedagang, dan karyawan swasta, sedangkan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan adalah perkebunan karena memiliki tanah yang subur, selain itu sumber daya alam yang dapat dikembangkan adalah perikanan, pertambangan, dan peternakan.

Berdasarkan hasil laporan bulanan kependudukan yang dikirim desa pemerintahan Kecamatan Tanah Putih, jumlah penduduk di Kecamatan tanah

Putih hingga saat ini tercatat sebanyak 64.853 jiwa dengan jumlah KK 16.360 yang terdiri dari bermacam-macam suku diantaranya yaitu, Melayu, Jawa, Minang, Batak, dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tanah Putih setiap tahunnya terus bertambah. Pertumbuhan ini dimungkinkan karena tingkat kesejahteraan yang cukup stabil dan cenderung meningkat, terlebih dalam situasi perekonomian negara dewasa ini yang masih belum pulih, di mana Kecamatan Tanah Putih masih memiliki potensi dan peluang bagi para pencari kerja dan pendatang baik sebagai pekerja keras kasar maupun membuka usaha sendiri.

Seperti pada umumnya penduduk Indonesia, sebagian besar penduduk Kecamatan Tanah Putih bermata pencaharian sebagai petani andalan kelapa sawit, karet, buruh, pedagang, dan berkebun. Namun tidak sedikit juga yang bekerja di bidang lain seperti menjadi PNS, karyawan swasta, dan wiraswata.

C. Struktur Organisasi



Sumber : Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, 2020.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada pembahasan dibawah ini:

Tabel V.1: Identitas Resonden Penelitian Terkait Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

No	Nama	Posisi / Status
1	Hj. Alyusni	Lurah Sedinginan

2	Muhammad Maskur	Kasi Pembangunan
3	Burhanudin	Ketua LPM.
4	Rudi Asmi	Tokoh Masyarakat
5	Bayu Sembara	Tokoh Masyarakat
6	Rooni Batubara	Tokoh Masyarakat

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2020*

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 (lima) orang, yang berasal dari Dinas Perhubungan, Supir Trans Metro Pekanbaru, dan juga Supir serta Penumpang Trans Metro Pekanbaru, dengan informan yang telah disebutkan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan teori efektivitas menurut Kurniawan yang mana kriteria efektivitas yang dimaksud dalam dilihat pada pembahasan dibawah ini:

73

B. Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2014:85) mengatakan bahwa Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Para manajer membagi kerja kedalam fungsi-fungsi atau departemen-departemen khusus untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi perusahaan mereka,

dengan adanya penyampaian informasi yang jelas pengkomunikasian yang tepat, maka setiap individu akan dengan semangat dalam menyelesaikan tugasnya.

Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu pegawai, tujuan organisasi tidak akan tercapai. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Untuk mencapai koordinasi yang efektif, maka dibutuhkan fungsi manajemen di dalam pengorganisasiannya, dimana menurut Husaini, (2014:491), fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan (*Planing*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Pengarahan (*Directing*)
4. Pengendalian (*Conntrolling*)

Untuk mengetahui sejauh mana proses koordinasi yang telah berjalan di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis temukan dilapangan, dan dilengkapi dengan hasil analisis untuk memberikan penjelasan terhadap penelitian tersebut, dimana untuk pembahasan pertama dimulai dari point berikut ini:

1. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Di dalam Perencanaan, manajer memperhatikan masa depan, mengatakan “Ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya”.

Membuat keputusan biasanya menjadi bagian dari perencanaan karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses penyelesaian setiap rencana, Perencanaan penting karena banyak berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Contohnya, setiap manajer harus membuat rencana pekerjaan yang efektif di dalam kepegawaian organisasi.

Untuk mengetahui apakah Lurah Sedinginan telah menyusun Perencanaan dalam melakukan pembangunan di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan beliau sebagai berikut ini:

“Sudah ada tentunya, perencanaan itu sifatnya wajib, kita harus bisa menyusun rencana program yang akan kita kerjakan untuk membangun kelurahan ini, dan beberapa program tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, seperti pembangunan fisik kampung misalnya”. (Wawancara, 1 September 2020, Lurah Sedinginan Hj. Alyusni)

Melanjutkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Hj. Alyusni diatas, penulis juga menanyakan tentang bagaimana perencanaan yang dilakukan selama ini, apakah melibatkan masyarakat dan juga lembaga lain atau tidak, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Wajib, karna perencanaan-perencanaan program memang harus di diskusikan dan disetujui oleh lembaga lain seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya, nantinya mereka akan di undang untuk membahas apa rencana strategis ke depannya untuk membangun Sedinginan”. (Wawancara, 1 September 2020, Lurah Sedinginan Hj. Alyusni)

Melanjutkan pembahasan diatas, penulis juga menanyakan tentang perencanaan tentang apa saja yang menjadi topik pembahasan dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh Lurah Sedinginan bersamaam dengan tokoh masyarakat dan LPM, apakah perencanaan tersebut meliputi anggaran dan program kerja, dan jawaban yang diberikan oleh Ibu Hj.Alyusni adalah sebagai berikut:

“Tentunya kita akan bahas semua yang berkaitan dengan pembangunan itu sendiri, mulai dari anggaran yang direncanakan, program pembangunan apa saja yang sesuai dengan anggaran tersebut, dan mana yang menjadi prioritas pembangunannya, semua akan dilakukan pembahasan secara bersama”. (Wawancara, 1 September 2020, Lurah Sedinginan Hj. Alyusni)

Untuk mendapatkan jawaban yang maksimal, selain melakukan wawancara dengan informan dari Lurah Sedinginan, penulis juga melakukan wawancara bersama beberapa informan yang memang berkaitan dengan proses perencanaan itu sendiri, diantaranya adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu Bapak Burhanudin, adapun pertanyaan yang penulis ajukan kepada beliau adalah tentang proses perencanaan terhadap pembangunan yang berjalan di Kelurahan Sedinginan, dan jawaban yang beliau berikan adalah:

“Dilakukan, kita memang membahas semua perencanaan program itu secara bersama, dan itu memang kewajiban, bukan undangan atau partisipasi begitu saja, tanpa persetujuan dari LPM dan Masyarakat, program-program kerja tersebut tentunya tidak sah untuk di programkan dalam program kerja tahunan”. (Wawancara, 1 September 2020, Pukul 11.00 Wib, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Bapak Burhanudin)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis menanyakan tentang ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Kelurahan Sedinginan dalam menjalankan program-program tersebut, dan adapun hasil wawancara penulis dengan Ketua LPM Sedinginan adalah sebagai berikut:

“Ada, anggaran sudah di ajukan ke Pemerintah Pusat tentunya, dan untuk tahun 2019 itu sudah disetujui dan di keluargan Dana Desa khususnya untuk pembangunan, diluar dari dana tersebut, tentunya ada dana-dana yang bersumber dari hal lain, seperti retribusi dan hibah dari pihak swasta disekitar wilayah kelurahan Sedinginan”.
(Wawancara, 1 September 2020, Pukul 11.00 Wib, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Bapak Burhanudin)

Dari hasil penjelasan yang disajikan diatas, dapat diberikan kesimpulan bahwa proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Sedinginan sudah dilakukan, baik itu berkoordinasi dengan lembaga lain maupun dengan masyarakat setempat.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi, *organizing* juga meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.

Aspek utama lain dari *organizing* adalah pengelompokan kegiatan ke departemen atau beberapa subdivisi lainnya. Misalnya kepegawaian, untuk memastikan bahwa sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Mempekerjakan orang untuk pekerjaan merupakan aktifitas

kepegawaian yang khas. Kepegawaian adalah suatu aktifitas utama yang terkadang diklasifikasikan sebagai fungsi yang terpisah dari *organizing*.

Agar tujuan tercapai maka dibutuhkan pengorganisasian. Dalam organisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi. Yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan. Pada setiap jabatan biasanya memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan uraian jabatan (*Job Description*).

Semakin tinggi suatu jabatan biasanya semakin tinggi tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Biasanya juga semakin besar penghasilannya. Dengan pembagian tugas tersebut maka pekerjaan menjadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Disinilah salah satu prinsip dari manajemen. Yaitu membagi-bagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Dan untuk mengetahui apakah permasalahan terkait dengan *organizing* dalam proses pembangunan di Kelurahan Sedinginan, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis dapat dilapangan, dan yang pertama adalah wawancara yang penulis lakukan bersama dengan Ibu Hj.Alyusni selaku Lurah Sedinginan yang memang menjadi informan kunci dalam penelitian ini, dan jawaban yang beliau berikan terkait dengan *organizing* yang meliputi hal-hal seperti Penetapan Tim Kerja, menentukan masing-masing tugas dari tim kerja tersebut, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program kerja itu sendiri, dan jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut:

“Sudah ada pembagian tugasnya masing-masing, salah satunya adalah penetapan struktur organisasi dalam kelurahan sedinginan, nantinya tiap-tiap bagian struktur organisasi akan diberikan tugas sebagaimana bidang yang ia pimpin, salah satunya adalah Kepala Seksi

Pembangunan, nantinya bidang inilah yang akan mengkoordinir pembangunan, menyusun konsep dan eksekusinya dilapangan, dan tentunya saya tetap berada disana untuk melakukan pengawasan”.

(Wawancara, 1 September 2020, Lurah Sedinginan Hj. Alyusni)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan tentang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang terjadi di Kelurahan Sedinginan, dan adapun jawaban yang diberikan oleh Lurah Sedinginan terkait pertanyaan tersebut adalah:

“Secara langsung kita melibatkan masyarakat dilapangan, contoh paling terbaru yang bisa saya berikan adalah pembangunan semenisasi atau penyemenan jalan atau gang kampung, Pemerintah Kelurahan memberikan anggaran untuk hal tersebut, tetapi demi menjalin kerjasama dan semangat gotongroyong, kita membuat program agar proses semenisasi tersebut dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, intinya eksekusi penyemenan dilapangan itu menjadi tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri, dan itu sudah kita koordinasikan”.

(Wawancara, 1 September 2020, Lurah Sedinginan Hj. Alyusni)

Untuk melengkapi hasil wawancara yang penulis sajikan diatas, informan selanjutnya yang penulis wawancarai adalah Burhanudin, yang menjabat sebagai Kasi Pembangunan Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pertanyaan yang penulis ajukan kepada beliau adalah seputar keterlibatan masyarakat dan penetapan tim kerja untuk melakukan pembangunan dilapangan, adapun jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Sudah dibuat tim-tim nya, siapa aja yang nantinya akan melakukan eksekusi terhadap program kerja tersebut, dan untuk proses pembangunan dilapangan, salah satu yang memang bertanggungjawab

kepada Lurah adalah saya, baik itu proses pembangunannya, ataupun keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan itu sendiri nantinya”.
(Wawancara, 1 September 2020, Kasi Pembangunan Kelurahan Sedinginan, Burhanudin)

Dalam kesempatan ini, untuk melengkapi hasil penelitian yang telah di dapatkan, penulis juga melakukan wawancara dengan warga sekitar, atau masyarakat di Kelurahan Sedinginan, hal ini tentunya untuk menanyakan bagaimana proses pembangunan yang telah dilakukan selama ini, apakah telah melibatkan masyarakat atau tidak, dan jawaban yang diberikan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Sedinginan adalah sebagai berikut:

“Ada programnya memang, dan sebelum melakukan program itu, kami masyarakat juga di undang perwakilannya, dan itu disetujui sama masyarakat, tetapi fakta dilapangan memang sedikit berbeda, ketika dilakukan semenisasi, tidak semua masyarakat yang bisa hadir dalam proses penyemenan jalan-jalan kampung tersebut, dan lebih memilih membayar denda karna beberapa alasan pribadi mereka”.
(Wawancara, 1 September 2020, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sedinginan, Bapak Bayu Sembara)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ditemukan fakta bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Lurah dalam melakukan pembangunan di Kelurahan Sedinginan sudah dijalankan, salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses eksekusi pembangunan dilapangan, salah satunya adalah terkait pembangunan semenisasi jalan-jalan kampung.

Tetapi fakta yang ditemukan oleh penulis dilapangan memberikan gambaran, disaat pembangunan berlangsung, masalah baru muncul, diantaranya adalah ketidak siapan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

gotong-royong itu sendiri, hal ini dikatakan berkaitan dengan waktu dari masyarakat itu sendiri.

Hal-hal seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sedinginan, dimana peran LPM untuk menampung aspiran masyarakat sangat dibutuhkan agar kedepannya kesepakatan bisa di dapatkan dan program berjalan dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang merasa kecewa dengan program yang di rencanakan.

3. Pengarahan (*Directing*)

Yang dimaksud dengan fungsi pengarahan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para manajer seperti menginstruksi, membimbing dan mengawasi kinerja pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan juga dianggap sebagai jantung dari proses manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan menjadi tidak penting jika fungsi pengarahan tidak terlaksana. Manajer harus bisa menjalankan fungsi pengarahan dengan sebaik mungkin karena ini merupakan salah satu fungsi manajer juga, bahkan menjadi fungsi manajer yang paling penting.

Dengan menjalankan fungsi ini maka organisasi bisa dikatakan aktif atau hidup. Kegiatan organisasi yang sudah tersusun dalam perencanaan akan dilakukan, digerakan oleh fungsi ini. Sebagai contoh, sebuah organisasi sudah menyusun perencanaan, membentuk struktur organisasi, memiliki sumber daya dan faktor produksi. organisasi itu tidak akan menghasilkan jika tidak menjalankan fungsi pengarahan.

Pengarahan berarti menggerakkan semua sumber daya dan unsur organisasi untuk melakukan aktivitas yang sudah direncanakan. Keberhasilan sebuah organisasi tergantung dari proses organisasi nya, dan hasil yang akan didapatkan oleh organisasi juga tergantung dari proses pengarahan.

Demikian juga dengan proses koordinasi yang harusnya terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan seperti kantor Kelurahan, dimana peran lurah tentunya sangat di perlukan untuk memberikan pengarahan kepada bawahan yang dipimpinnya, dan untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dimana salah satunya adalah dengan mewawancarai informan penulis yaitu Ibu Hj. Alyusni selaku Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tanggapan beliau terkait pertanyaan penulis seputar proses pengarahan dan pemberian motivasi kepada bawahannya adalah sebagai berikut:

“Pastinya selalu saya pantau, saya awasi, arahkan dan bimbing mereka untuk menjalankan tugas yang diberikan, saya rutin melakukan rapat-rapat internal di kantor kelurahan, hal ini tentunya untuk mencari tau apa saja yang kurang dan perlu di perbaiki, atau hanya sekedar mengetahui pendapat dari pegawai lain yang bekerja di kantor ini”.

(Wawancara, 1 September 2020, Lurah Sedinginan Hj. Alyusni)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan tentang bagaimana proses pemberian motivasi yang dilakukan oleh Lurah Sedinginan untuk meningkatkan kinerja dari pegawainya, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Motivasi ini tentunya bermacam-macam, bisa jadi mendapatkan beberapa reward nantinya, penghargaan, atau bonus yang akan kita

berikan apabila memang target program selesai dengan tepat waktu, bonus ini tentunya belum pasti karna harus diambil dari dana saya pribadi atau operasional saya, hal tersebut tidak masuk dalam anggaran kerja, jadi saya sendiri yang punya inisiatif untuk hal itu”.
(Wawancara, 1 September 2020, Lurah Sedinginan Hj. Alyusni)

Untuk memastikan hal tersebut benar telah terlaksana atau tidak, penulis melanjutkan proses wawancara kepada pegawai yang memang menjadi bawahan dari Lurah Sedinginan, diantaranya adalah Muhammad Maskur, yang saat ini menjabat sebagai Kasi Pembangunan di Kelurahan Sedinginan, dan tanggapan yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis tentang motivasi dan pengarahan yang diberikan oleh Lurah Sedinginan, adalah sebagai berikut:

“Beliau memang sering memberikan masukan-masukan ke kita, memberikan arahan-arahan apa yang harus dilakukan, cara-cara melaksanakan pekerjaan yang efektif seperti apa, beliau sering memberikan masukan-masukan seperti itu, dan saya kira motivasi-motivasi yang beliau berikan tidak pandang bulu, semua sama dimata beliau, selalu memberikan perhatian kepada bawahannya, khususnya dalam hal bekerja, dan juga secara personal juga dekat dengan kami bawahannya, hal ini cukup membantu untuk menjalankan pekerjaan”.
(Wawancara, 1 September 2020, Kasi Pembangunan Kelurahan Sedinginan, Bapak Muhammad Maskur)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Lurah Sedinginan juga telah menjalankan fungsi Pengarahan terhadap bawahannya, hal ini tentunya sangat penting mengingat lurah adalah pimpinan dalam kelurahan, dan apabila menginginkan keberhasilan dalam proses pembangunan terhadap program yang dijalankan, maka diperlukan koordinasi

kepada bawahannya, dan juga pengarahan sistem kerja yang jelas agar nantinya bawahannya tidak melakukan kesalahan disaat bekerja.

Pada umum tujuan dari pengarahan adalah agar tugas-tugas yang menjadi kewajiban para anggota organisasi dapat dijalankan dan diselesaikan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan berpedoman pada perencanaan (planning) yang sudah ditetapkan organisasi.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *controlling* merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi Pengendalian atau *controlling* ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya.

Pengendalian adalah proses dimana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam pengendalian, para manajer memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi bekerja seperti yang dikehendaki, bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja.

Fungsi Pengendalian pada dasarnya dilakukan di semua jenis organisasi baik yang berupa komersial maupun yang non-komersial dan dilakukan di semua tingkatan manajemen yaitu manajemen puncak, manajemen tingkat menengah

maupun manajemen tingkat bawah. Fungsi Pengendalian akan membandingkan kinerja aktual organisasi dengan standar yang ditentukan, menemukan penyimpangan dan upaya untuk mengambil tindakan korektif. Dalam fungsi pengendalian ini juga membantu merumuskan perencanaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, Fungsi pengendalian akan membantu dalam membawa siklus manajemen kembali ke perencanaan.

Untuk mengetahui proses *controlling* yang dilakukan oleh Lurah Sedinginan terkait dengan proses pembangunan di wilayah kelurahan sedinginan, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dilapangan, dimana hasil wawancara yang telah penulis dapatkan salah satunya adalah dengan Ibu Hj. Alyusni selaku Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tanggapan beliau terkait pertanyaan penulis seputar proses pengawasan terhadap pegawai yang ditugaskan menjalankan tugas program pembangunan di Kelurahan Sedinginan adalah sebagai berikut:

“Seperti yang saya katakana sebelumnya tadi, saya sendiri aktif turun kelapangan apabila memang ada program yang sedang dikerjakan, contohnya pembangunan jalan, semenisasi, ataupun hal lainnya, saya sendiri yang langsung memantau dilapangan, dan hal seperti itu salah satu fungsi dari manajemen tadi, yaitu pengawasan”. (Wawancara, 1 September 2020, Lurah Sedinginan Hj. Alyusni)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan tentang bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh Lurah Sedinginan terhadap kinerja dari tim yang ditugaskan dalam melakukan pekerjaan terkait program-program kelurahan, apakah ada tindakan evaluasi atau tidak, dan jawaban yang

diberikan oleh Ibu Hj. Alyusni selaku Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

“Kita sesuaikan dengan kemauan masyarakat, apabila suatu program telah dijalankan, dan ternyata masyarakat merasa ada yang kurang dalam program tersebut, nantinya akan kita lakukan evaluasi, kita rapatkan lagi masalahnya untuk mencari solusinya, contohnya terkait dengan bantuan program pemberdayaan masyarakat, kemarin sudah kita berikan program, dan ternyata masyarakat ada yang kurang puas dengan program itu, kami di kelurahan melakukan evaluasi untuk mencari solusinya, bagaimana supaya semua lancar, tapi satu hal yang pasti memang, kita tidak bisa memberikan kepuasan kepada semua orang, prioritas kita adalah umum”. (Wawancara, 1 September 2020, Lurah Sedinginan Hj. Alyusni)

Selain pembahasan diatas, penulis juga menanyakan perihal tentang penerapan sanksi yang diberikan oleh lurah terhadap anggota yang menjalankan tugas dilapangan, apakah selama ini pernah memberikan sanksi apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan, dan jawaban yang diberikan oleh Ibu Hj. Alyusni selaku Lurah Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

“Tidak pernah, sejauh ini belum ada sanksi apapun yang diberka, karna tidak ada tindakan yang memerlukan sanksi, kecuali memang ada hal yang melanggar hukum, barulah akan kita tindak”. (Wawancara, 1 September 2020, Lurah Sedinginan Hj. Alyusni)

Selain melakukan wawancara dengan informan kunci, yaitu Lurah Sedinginan, penulis juga melengkapi penelitian dengan melakukan wawancara terhadap Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sedinginan, hal ini bertujuan untuk mencari tau apakah memang benar lurah

sedinginan menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan tugas dari bawahannya dilapangan, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Burhanudin, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sedinginan adalah sebagai berikut:

“Turun langsung kelapangan, beliau memang rutin melakukan aktivitas tersebut apabila ada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu program kemsyarakatan ataupun program-program pembangunan fisik di Kelurahan Sedinginan”. (Wawancara, 1 September 2020, Pukul 11.00 Wib, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Bapak Burhanudin)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat atau salah satu tokoh masyarakat diwilayah tersebut, hal ini tentunya bertujuan untuk menyeimbangkan hasil penelitian agar ditemukan jawaban yang sinkron terkait hasil-hasil wawancara sebelumnya, dan adapun informan yang penulis wawancarai adalah Bapak Rooni Batubara yang merupakan salah satu masyarakat terlama yang tinggal di wilauah Kelurahan Sedinginan, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah:

“Ada, lurah sering turun langsung kelapangan kalau ada acara-acara yang sedang berlangsung, beliau langsung yang mengawasi program atau kegiatan tersebut, baik itu program pemberdayaan maupun pembanguan seperti semenisasi jalan kampung, beliau juga turun langsung kelapangan untuk meninjau proses pembangunan”. (Wawancara, 1 September 2020, Pukul 11.00 Wib, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sedinginan, Bapak Rooni Batubara)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada pembahasan tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Lurah Sedinginan terkait dengan program pembangunan di Kelurahan Sedinginan sudah berjalan pada beberapa item indikator tetapi penerapan hasil

pembangunan belum berjalan sesuai dengan yang di inginkan masyarakat pada umumnya, khususnya terkait pemerataan pembangunan dilapangan, masih terdapat beberapa wilayah yang memang belum dilakukan pembangunan, khususnya pembangunan jalan atau semenisasi jalan kampung.

C. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dihadapi Oleh Lurah Sedinginan Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lurah, yang mana salah satunya menjalankan peran melakukan koordinasi dengan bawahan dalam menjalankan program-program kerja, khususnya terkait dengan pembangunan dilapangan, tentunya akan ditemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas tersebut, dan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Lurah Sedinginan, faktor penghambat yang dialami dalam melakukan koordinasi pembangunan adalah informasi yang kadang tidak sesuai dilapangan, antara arahan dan hasil dilapangan tidak berjalan dengan baik, hal inilah yang sering membuat lurah sedinginina harus kerja lebih ekstra dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pegawainya.
2. Faktor penghambat lainnya adalah terkait dengan kesiapan masyarakat dalam menerima pembangunan yang dilakukan, dimana selama ini masyarakat tidak sabar untuk menunggu proses pembangunan itu selesai, dan kadang memberikan pendapatkannya kalau lurah melakukan pembangunan tidak adil, padahal faktanya adalah pembangunan dilakukan secara bertahap karna memang adanya keterbatasan anggaran dana di Kelurahan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dimana telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian dilapangan dengan metode observasi ataupun dengan cara melakukan wawancara terhadap informan penulis, maka kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan jawaban bahwa pelaksanaan wewenang lurah dalam melakukan koordinasi pembangunan di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, dimana pada kenyataannya, koordinasi yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada masyarakat, khususnya dari segi pembangunan yang terlaksana, masyarakat mengatakan bahwa masih banyak wilayah di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih yang memang belum tersentuh pembangunan, khususnya semenisasi terkait jalan kampung, karna bagi masyarakat salah satu hal yang paling utama adalah perbaikan akses jalan di kampung mereka.
2. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Lurah Sedinginan, faktor penghambat yang dialami⁹⁰ m melakukan koordinasi pembangunan adalah informasi yang kadang tidak sesuai dilapangan, antara arahan

dan hasil dilapangan tidak berjalan dengan baik, hal inilah yang sering membuat lurah sedinginan harus kerja lebih ekstra dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pegawainya. Selanjutnya adalah adalah terkait dengan kesiapan masyarakat dalam menerima pembangunan yang dilakukan, dimana selama ini masyarakat tidak sabar untuk menunggu proses pembangunan itu selesai, dan kadang memberikan pendapatkannya kalau lurah melakukan pembangunan tidak adil, padahal faktanya adalah pembangunan dilakukan secara bertahap karna memang adanya keterbatasan anggaran dana di Kelurahan Sedinginan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis:
 - a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti isu tentang Koordinasi yang dilakukan oleh Lurah terhadap pembangunan diwilayahnya, penulis tentunya berharap agar peneliti selanjutnya dapat melanjutkan proses penelitian ini denan lebih mendalami lagi focus penelitiannya, agar nantinya mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan baik lagi.
 - b. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan yang sama dikarenakan hasil penelitian yang penulis dapatkan saat ini

secara umum belum mendapatkan jawaban yang diharapkan sepenuhnya, khususnya terkait dengan Koordinasi yang dilakukan oleh lurah dalam menjalankan program-program pembangunan.

2. Saran Akademis

- a. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama yaitu tentang Wewenang Lurah Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Di Kelurahan, Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara mengadakan wawancara atau penyebaran kuesioner guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

3. Saran Praktis

- a. Penulis menyarankan kepada Lurah Sedinginan agar memberikan perhatiannya terkait dengan keluhan-keluhan yang diberikan masyarakat dilapangan, dimana masyarakat mengharapkan agar pembangunan dilakukan secara merata terhadap semua wilayah yang ada di Kelurahan Sedinginan, khususnya terkait d € pembangunan semenisasi jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds). 1996. *Manajemen Jilid I*. terj. Alexander Sindoro, Jakarta: PT Prahallindo.
- Afifuddin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Bumi Aksa.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Handayani, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Masagung
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Hasibuan, M. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indroharto. 1996. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I, Cetakan Keenam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: marpoyan tujuh
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Jilid 1-2. Rineka Cipta.
- Nugroho, Iwan dan Rohim. 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Nugroho, Rochim. 2004. *Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri

Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Solichin, Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharno. 2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Siagian, Sondang. 2007. *Fungsi-fungsi manajerial edisi revisi*. Jakarta. Bumi Aksara

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.

Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press (Anggota IKAPI).

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir.